EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

TUGAS AKHIR

Oleh:

ARIA HESTI WINDANI
2103100027

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap	:	**ARIA HESTI WINDANI**
NPM	:	2103100027
Program Studi	:	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pada Hari, Tanggal	:	KAMIS, 28 AGUSTUS 2025
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**.... (.....)

PENGUJI II : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S. Sos, M.SP** (.....)

PENGUJI III : **KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA**..... (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP	**Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam spenulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap	:	**ARIA HESTI WINDANI**
NPM	:	2103100027
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	:	Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil

Medan, 24 Juli 2025

Pembimbing

KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA
NIDN: 0104089401

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan

Assoc.,Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **ARIA HESTI WINDANI**, NPM **2103100027**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 September 2025

Yang Menyatakan,



ARIA HESTI WINDANI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: ''Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil''

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada cinta pertamaku kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Sabri Party dan Ibu Chalijah atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis

mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Serta tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khaidir Ali, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.

9. Bapak Erwin Syahputra, ST, MM Selaku Kepala Dinas PUPR dan Bapak Hamzah Fansuri, ST Selaku Kabid Pengairan serta para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Mak Cik, Pak Cik, Pak tangah, serta Mak Tangah. Di saat kondisi ekonomi Bapak sedang sulit, kalian hadir dengan tangan terbuka membantu tanpa diminta. Bantuan itu bukan hanya meringankan beban, tapi juga menjadi suntikan semangat yang sangat berarti bagi saya. Di saat saya hampir menyerah, perhatian dan dukungan kalian menjadi penguat untuk terus melangkah. Tanpa bantuan dan kepedulian dari keluarga besar dari pihak Bapak, mungkin skripsi ini tak akan pernah selesai. Terima kasih atas ketulusan yang tidak akan pernah saya lupakan.
11. Terima kasih untuk Icha Meillya, yang tak kalah spesial penulis sampaikan untuk sahabatku sejak SMA hingga kuliah. Bukan hanya teman belajar, tapi juga teman curhat, sekamar, dan partner begadang. Kamar kost kita jadi saksi tawa, keluh kesah, dan tangis tengah malam. Persahabatan ini di mulai sejak SMA, tapi kenangan di kamar kost akan selalu jadi berkesan.

12. Ikbarul Mufid Syam, seseorang yang penting di dalam kehidupan penulis karena telah senantiasa mendengarkan seluruh keluh kesah penulis, memberikan perhatian, pengertian, dukungan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
13. Anisa Puspita Sari, Windy Aulia Nasution, Cinta Salsabila, Icha Budiarti, terima kasih untuk sahabat terbaik selama kuliah. Atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai. Meski pada akhirnya kita tidak lulus bersama seperti yang dulu kita rencanakan, semoga kebersamaan ini jadi kenangan indah yang tak terlupakan.
14. Teruntuk Debi Wahyuni Putri terima kasih untuk sahabat yang telah membersamai sejak semester awal hingga hari ini. Kebersamaan dan bantuannya dalam proses skripsi ini sangat berarti.
15. Aria Hesti Windani, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini mungkin bukan yang terbaik, tapi ia lahir dari proses panjang, letih yang tertahan, dan semangat yang terus dinyalakan. Seperti dalam lirik Taylor Swift, "You're on your own, kid – you always have been," penulis belajar berdiri sendiri, berjuang dalam diam dan tetap berjalan meski pelan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi jejak kecil yang bermakna bagi siapa pun yang tengah berjuang diam-diam untuk tidak menyerah.
16. Seluruh pihak yang yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan., serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Aamiin yaa Rabbal ‘ Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 23 Juli 2025

Penulis

ARIA HESTI WINDANI

EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ARIA HESTI WINDANI
2103100027

ABSTRAK

Pengendalian abrasi pantai merupakan masalah penting di Indonesia karena panjang garis pantai negara dan seberapa penting kawasan pesisir untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pantai Pulo Sarok di Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu daerah yang paling terpengaruh, terutama kawasan wisata Danau Belibis, yang saat ini mengalami kerusakan akibat abrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif fungsi *planning* Dinas Pekerjaan Umum dalam mengendalikan abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, serta faktor alam seperti perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, serta aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengendalian abrasi masih kurang efektif. Hal ini dapat di buktikan dengan: (a) Sudah adanya pemahaman program pengendalian abrasi. (b) Sudah adanya efektivitas program yang tepat sasaran dalam pengendalian abrasi. (c) Sudah adanya program untuk pencapaian tujuan dalam pengendalian abrasi. (d) Sudah adanya program untuk kegiatan terukur dalam pengendalian abrasi. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat dan partisipasi, serta keyakinan bahwa abrasi sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah. Selain itu, intervensi belum merata di beberapa wilayah yang terdampak belum tertangani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas fungsi *planning* sangat penting dalam pengendalian abrasi pantai meskipun program telah memberikan dampak positif, pelaksanaanya belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Fungsi Planning, Abrasi Pantai, Pengendalian Abrasi*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1.4. Manfaat Penelitian 6
1.5. Sistematika Penulisan 7
BAB II URAIAN TEORITIS **9**
2.1. Efektivirtas 9
2.1.1. Pengertian Efektivitas 9
2.1.2. Indikator Efektivitas 11
2.2. Perencanaan 12
2.2.1. Pengertian Perencanaan 12
2.2.2. Tujuan Perencanaan 13
2.2.3. Jenis-jenis Perencanaan 15
2.2.4. Proses Penyusunan Perencanaan 18
2.2.5. Fungsi Perencanaan 20
2.3. Pengertian Abrasi 21
BAB III METODE PENELITIAN **24**
3.1. Jenis Penelitian 24
3.2. Kerangka Konsep 25
3.3. Definisi Konsep 25
3.4. Kategorisasi Penelitian 26
3.5. Informan atau Narasumber 27
3.6. Teknik Pengumpulan Data 29
3.7. Teknis Analisis Data 31
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian 32

3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....33
3.9.1. Profil Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil.....33
3.9.2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas PUPR.....35
3.9.3. Tugas Pokok Yang Terlibat Dalam Pengendalian Abrasi ...35
3.9.4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.....37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....38
4.1 Hasil Penelitian.....38
4.1.1. Adanya Pemahaman Program 38
4.1.2. Adanya Program Tepat Sasaran.....42
4.1.3. Adanya Program Dalam Pencapaian Tujuan 46
4.1.4. Adanya Program Kegiatan Yang Terukur.....49
4.2. Pembahasan 54
4.2.1. Adanya Pemahaman Program Pengendalian Abrasi.....54
4.2.2. Adanya Efektivitas Program Yang Tepat Sasaran Dalam Pengendalian Abrasi.....57
4.2.3. Adanya Program Untuk Pencapaian Tujuan Dalam Pengendalian Abrasi.....60
4.2.4. Adanya Program Untuk Kegiatan terukur Dalam Pengendalian Abrasi.....62
BAB V PENUTUP.....66
5.1. Simpulan.....66
5.2. Saran 67
DAFTAR FUSTAKA.....68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 28

Tabel 4.2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 28

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin 28

Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 kerangka Konsep 25

Gambar 3.3. Peta Lokasi Penelitian 32

Gambar 3.4 Pantai Wisata Danau Belibis 33

Gambar 3.5 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil..... 34

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengendalian abrasi pantai di Indonesia menjadi isu penting karena Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan kaya akan keanekaragaman hayati serta ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai pelindung alami. Namun, berbagai pantai di Indonesia mengalami abrasi yang semakin parah, terutama karena kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Faktor alam seperti gelombang laut yang kuat, kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, dan badai tropis sering kali menyebabkan pengikisan pantai. Sementara itu, aktivitas manusia seperti pembangunan di wilayah pesisir tanpa perencanaan yang matang, penambangan pasir, reklamasi pantai, dan penebangan hutan mangrove memperparah masalah ini. Mangrove, yang berfungsi sebagai penahan alami terhadap abrasi, semakin berkurang akibat pengalihan lahan untuk kepentingan ekonomi, misalnya tambak atau pembangunan infrastruktur.

Efektivitas merupakan sesuatu yang penting dalam proses pemerintahan indonesia karena menentukan seberapa efektif suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. jika operasi pemerintah efektif, hasilnya akan sesuai dengan rencana dan pernyataan resmi pemerintah. Dalam hal ini upaya pengendalian abrasi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan dana dan teknologi, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Pendekatan-pendekatan yang telah

dilakukan, seperti pembangunan pemecah gelombang dan rehabilitasi mangrove, sering kali tidak berjalan efektif atau berkelanjutan. Selain itu, masih ada masalah terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak ekosistem pantai. Permasalahan ini berdampak serius, mulai dari kehilangan lahan produktif, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Hal ini juga berpengaruh pada sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi lokal yang bergantung pada kondisi pantai yang sehat. Tanpa penanganan yang komprehensif, abrasi pantai dapat mengancam ketahanan lingkungan dan sosial-ekonomi di wilayah pesisir Indonesia termasuk aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan bangunan pengaman pantai kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 5 Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (*rob*) erosi serta abrasi, fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai dan pendangkalan muara sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pantai sebagaimana mempunyai peran penting, baik sebagai pusat pertumbuhan, pelabuhan, perdagangan, permukiman masyarakat maupun ekosistem alam tempat berkembangnya berbagai biota pantai dan perikanan bahwa bangunan pengaman pantai sebagaimana ditujukan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat

yang tinggal di sepanjang pantai, ekosistem pantai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, atau nilai sejarah dari perusakan yang diakibatkan kegiatan manusia atau akibat bencana alam. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pengamanan pantai.

Abrasi merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan garis pantai, oleh karena itu masalah ini harus segera di atasi selain membuat garis-garis pantai menjadi sempit hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian yang amat besar (Chairani, 2018). Perubahan terhadap garis pantai merupakan satu proses tanpa henti melalui berbagai proses baik pengikisan (abrasi) maupun penambahan (akresi) pantai yang diakibatkan oleh pergerakan sedimen, arus susur pantai (*longshore current*), tindakan ombak dan penggunaan tanah Hakim dalam (Iya & Yaskinul, 2020). pantai-pantai yang menjadi destinasi pariwisata para wisatawan lokal maupun mancanegara yang sering mengunjungi keindahan pantai lambat laun akan mulai berkurang.

Efektivitas yang dilakukan di dalam wilayah Aceh masih belum mencapai tingkat hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan, termasuk koordinasi yang buruk antarinstansi, jumlah sumber daya yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam program pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan upaya perbaikan agar setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara optimal. Dalam hal ini wilayah provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatra, Indonesia memiliki garis pantai panjang dan kekayaan sumber daya alam, memiliki peran penting dalam perikanan,

pertanian, dan parawisata, namun abrasi pantai yang meluas menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah. Abrasi pantai di wilayah Aceh disebabkan oleh faktor alam, seperti perubahan iklim yang memicu kenaikan permukaan laut dan erosi, serta aktivitas manusia seperti penebangan hutan mangrove dan pembamgunan pesisir. Tanpa perlindungan vegetasi mangrove, pantai menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Salah satu Pantai pulo sarok di Aceh Singkil, yang terkenal akan keindahan alam dan sumber daya melimpah serta pantai danau belibis yang menjadi destinasi wisata unggulan dengan nilai ekologis tinggi, kini terancam oleh abrasi yang semakin merusak lingkungan di kawasan tersebut.

Efektivitas pengelolaan Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil masih sangat buruk upaya darurat dan swadaya masyarakat baru seperti pemasangan karung pasir dan ban bekas, tidak dapat menghentikan abrasi terus menggerus garis pantai dan mengancam permukiman dan fasilitas wisata. Dalam hal ini berdasarkan berita yang telah dilangsir dari Serambinews.com, abrasi pantai di Pulo Sarok, terutama di sekitar Pantai Danau Belibis, menjadi masalah yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir. Proses erosi yang terjadi akibat pengaruh gelombang laut yang semakin kuat, perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan laut, dan kurangnya perlindungan alami dari vegetasi seperti mangrove, telah menyebabkan pengikisan tanah di sepanjang garis pantai. abrasi pantai ini membawa dampak yang cukup besar. Wisatawan yang sebelumnya tertarik untuk mengunjungi Danau Belibis dan menikmati keindahan pantainya kini mulai berkurang, seiring dengan berkurangnya luas pantai dan degradasi ekosistem pesisir yang terjadi akibat abrasi. Hal ini mengancam pendapatan

masyarakat lokal yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama mereka. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh abrasi juga memengaruhi sektor perikanan, yang menjadi sumber pendapatan utama lainnya bagi penduduk setempat.

Masalah yang terjadi meskipun pemerintah telah menyusun rencana pengendalian abrasi pantai, efektivitasnya masih kurang optimal. Karena perencanaan yang tidak matang dan mengabaikan kompelksitas kondisi alam di pesisir pantai Danau Belibis termasuk dinamika perubahan alam seperti gelombang, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim, sehingga solusi yang diterapkan kurang efektif. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, teknologi, dan tenaga ahli menghambat pengendalian abrasi di Pantai Danau Belibis, sehingga program tidak maksimal. Hal ini mengancam ekosistem pesisir dan berkelanjutan parawisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.

Berdasarkan berita yang dilangsir dari Serambinews.com, keadaan pantai dan struktur sangat memprihatinkan. Air laut telah memasuki semua teras bisnis dan menjangkau jalan. Penahan ombak di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, belum dibangun. Sejak permukaan tanah di Singkil menurun sekitar 1 meter akibat gempa tsunami Aceh-Nias pada 28 maret 2005, usulan ini terus diajukan. Ketika musim angin tenggara melanda, air laut masuk ke daratan Singkil, menghasilkan efek penahan ombak yang tidak berhasil. Selain itu, ombak laut menghancurkan rumah warga di kawasan wisata danau belibis. Dampak hantaman ombak kali ini lebih parah, karena air laut masuk ke jalan dua jalur di wilayah Pulo Sarok dan

merusak bangunan di kawasan wisata danau belibis. Area pantai Pulo Sarok yang mencakup objek wisata Pantai.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menganalisis seberapa efektif perencanaan dapat mengatasi masalah abrasi yang semakin mengancam daerah Pantai Pulo Sarok, sehingga membantu evaluasi kebijakan saat ini. Dari permasalahan yang diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis seberapa efektif perencanaan dapat mengatasi masalah abrasi di Pantai Pulo Sarok dengan melakukan penelitian berjudul : **"Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dilatar belakang penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas fungsi *planning* pada Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maka yang menjadi tujuan penulis didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi *planning* pada dinas pekerjaan umum dalam upaya pengendalian abrasi pantai di kabupaten Aceh Singkil.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta memperluas pengetahuan penulis dalam berfikir dan menganalisa setiap gejala dan

permasalahan yang terjadi di lapangan.

b) Penelitian ini dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil merencanakan program pengendalian abrasi dengan lebih baik.

c) hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan di lakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka sistematika yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORTIS

Dalam bab ini menjelaskan teori tentang Efektivitas dan Perencanaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Lokasi Waktu Penelitian, dan Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran mengenai hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivirtas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan hasil dari tujuan dan ukuran kinerja seseorang, baik individu maupun kelompok dan organisasi. Efektivitas didefinisikan oleh para pakar dengan kalimat yang berbeda-beda tergantung pendekatan yang di gunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini dibahas beberapa definisi efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefiniasikan efektiviats sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Kurniawan dalam Lenak (2021) menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut Campbell dalam Ariyani dkk (2024) efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Menurut Mardiasmo dalam (Jumliadi dkk 2023) efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo menyatakan bahwa kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.

Menurut Sondang dalam Putra dkk (2023) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlahtertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barangatas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sejauh mana tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan optimal melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana secara cepat.

2.1.2. Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno dalam Anis dkk (2021) bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas ada 5 dimensi yaitu:

a) Pemahaman Program

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar sedangkan pemahaman proses perbuatan cara memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah (gangguan) yang ada pada individu atau sekelompok individu.

b) Tepat Sasaran

Indikator tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan.

c) Tepat Waktu

Indikator tepat waktu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu pennyelesainnya suatu kegiatan dengan sesuai target waktu yang direncanakan.

d) Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan merupakan pencapaian program yang sudah dilaksanakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan program.

e) Perubahan terukur

Indikator perubahan terukur merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak luar yang menerima program. Jika ada perubahan kearah yang lebih baik

maka program bisa di katakan berhasil.

Menurut Campbell dalam Ariyani dkk (2024) pengukuran efektivitas secara umum yaitu :

a. Keberhasilan program

b. Keberhasilan sasaran

c. Kepuasaan terhadap program

d. Tingkat input dan output

e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam pemahaman program adalah proses mendalami tujuan, perilaku, dan respons untuk menilai potensi dan masalah. Keberhasilan program diukur dari pencapaian sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta dampak positif yang dirasakan penerima manfaat.

2.2. Perencanaan

2.2.1. Pengertian Perencanaan

Menurut Suandy dalam Hafizh dkk (2023) berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Terry dalam Aneta dkk (2018) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi

mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Jone dalam Ummah (2019) perencanaan adalah segala proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Perencanaan juga dapat di artikan sebuah proses pemikiran dalam menetukan hal yang akan di kerjakan untuk masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil.

Menurut David dalam Joorie dkk (2019) perencanaan adalah proses dimana seseorang menentukan apakah ia akan menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumber daya yang memadai.

Dari beberapa definisi perencanaan diatas dapat di simpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah terbaik yang dapat di ambil di masa depan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2.2.2. Tujuan Perencanaan

Menurut Usman dalam Mahardika dkk (2024) tujuan perencanaan adalah:

1) Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya.
2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.
3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya, baik

kualifikasinya maupun kualitasnya.Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.

4) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu.
5) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.
6) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan.
7) Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui.
8) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Perencanaan atau merencanakan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefesien dan seefektif mungkin.

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yaitu:

(a) Perumusan tujuan yang ingin dicapai,

(b) Pemilihan program untuk mencapai tujuan,

(c) Identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Menurut Tjokrominoto dalam Gart dkk (2023) perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Handoko dalam Irmanto (2021) perencanaan meliputi:

(1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi

(2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system,

anggaran, dan standar.

Berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam dalam rangka mencapai tujuan dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut.

2.2.3. Jenis-jenis Perencanaan

Jenis-jenis Perencanaan menurut Saefullah dalam Mahardika dkk (2024) Perencanaan atau planning bukan hanya dapat dilihat dari bobot dan waktunya, perencanaan juga dapat dilihat pula dari macam dan jenisnya.

Jenis perencanaan menurut beliau adalah sebagai berikut:

1) Jenis perencanaan menurut penggunaannya

a) *Single use planning* (perencanaan sekali pakai), yaitu perencanaan untuk satu kali pakai. Jika pelaksanaan telah selesai, perencanaan tersebut tidak dipakai kembali, misalnya perencanaan yang berhubungan dengan kepanitiaan kegiatan tertentu.

b) *Repeat planning* (perencanaan ulang), yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang. Rencana ini terus-menerus atau berulang-ulang digunakan sehingga bersifat permanen.

2) Jenis perencanaan menurut prosesnya

a) *Policy planning* (perencanaan kebijakan), yaitu *planning* yang hanya berisi kebijakan tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis, Seperti perencanaan yang berkaitan dengan garis besar proses

pengorganisasian.

b) Program *planning* (perencanaan program), yaitu perencanaan yang merupakan penjelasan dan perincian dari *policy planning*. Program planning dibuat oleh badan-badan khusus yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan *policy planning*.

c) *Operational planning* (perencanaan kerja), yaitu planning yang memuat rencana mengenai cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar lebih berhasil dalam pencapaian tujuan dengan daya guna yang lebih tinggi (efektif dan efesien).

3) Jenis perencanaan menurut jangka waktu

a) *Long range planning* (perencanaan jangka panjang), yaitu perencanaan jangka panjang yang membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan-nya, biasanya memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun.

b) *Intermediate planning* (perencanaan menengah), yaitu sebuah perencanaan yang dalam pelaksanaan-nya membutuhkan waktu atau periode. Perencanaan ini biasanya memerlukan waktu lima tahun.

c) *Short range planning* (perencanaan jangka pendek), yaitu sebuah perencanaan yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa dan mendadak karena pentingnya dan waktu yang tersedia sangat sempit, sedangkan kebutuhan sangat mendesak dan tiba-tiba.

4) Perencanaan dari dimensi jenis

a) Perencanaan dari Atas ke Bawah (*Top Down Planning*)

Perencanaan ini dibuat oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi, misalnya pemerintah pusat yang selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke tingkat provinsi/ kabupaten.

b) Perencanaan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up Planning*)

Perencanaan ini dibuat oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi, misalnya dibuat di provinsi/kabupaten untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Perencanaan ini dapat pula dibuat oleh kepala sekolah untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Perencanaan ini dapat pula di buat oleh kepala sekolah untuk disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan setempat, atau guru kepada kepala sekolahnya.

c) Perencanaan Menyerong ke Samping (*Diagonal Planning*)

Perencanaan ini dibuat oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level bawah di luar stuktur organisasinya, misalnya Depdiknas Jakarta dan Bappeda Provinsi membuat perencanaan pendidikan sektoral di daerah. Perencanaan ini disebut juga perencanaan sektoral.

d) Perencanaan Mendatar (*Horizontal Planning*)

Perencanaan Mendatar biasanya dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel, misalnya perencanaan peningkatan sumberdaya manusia melibatkan pejabat Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Tras migrasi, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

e) Perencanaan Menggelinding (*Rolling Planning*)

Perencanaan menggelinding dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek dinilai setiap tahun pencapai kinerjanya, kemudian dilanjutkan tahun berikutnya sehingga perencanaan jangka menengah tercapai. Demikian seterusnya. Perencanaan ini menghasilkan Rencana Tahunan, Rencana Strategi.

f) Perencanaan Gabungan Atas ke Bawah dan Bawah ke Atas (*Top Down and Bottom-Up Planning*)

Perencanaan ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, oleh sebab itu, pembuatannya melibatkan partisipasi aktif kedua belah pihak.

2.2.4. Proses Penyusunan Perencanaan

Perencanaaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, kecuali diketahui pula penyusunan atau memulai sebuah perencanaan. Tanpa adanya proses, mustahil sebuah perencanaan akan tercapai. Secara spesifik Tjokroaminodjojo dalam (Mahardika dkk 2024) mengemukakan tahap-tahap proses perencanaan, termasuk dalam perencanaan pendidikan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana

1. Tinjauan keadaan,
2. perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*).
3. Tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara

pencapaian tujuan rencana tersebut.

4. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
5. Persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program Rencana

Dalam tahap ini, dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan agar mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Dalam menetapkan strategi ini, penyusunan program berdasarkan program jangka panjang dan jangka pendek.

c) Pelaksanaan Rencana

Dalam perencanaan, perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaan, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian. Dalam pelaksanaan, tentu ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Hal itulah yang akan menjadi koreksi dan dapat dibenahi untuk pelaksanaan selanjutnya.

d) Melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana

Dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan sangat diperlukan. Pengawasan berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*), proses (*procedure*) dan kewenangan (*authority*).

e) Evaluasi

Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi. Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan, dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau suatu tinjau yang berjalan secara terus menerus. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaa perencanaan.

2.2.5. Fungsi Perencanaan

Planning atau Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Fungsi perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil – hasil tersebut dengan rencana yang dibuat Suandy dalam (hafizh dkk 2023).

Setiap rencana yang dibuat tentunya memiliki sifat, manfaat, dan kelemahan. Donnell dalam Ridwan (2021) menyampaikan bahwa sebuah rencanaan yangakan dibuat haruslah bersifat sebagai berikut:

1. Menyokong pada pencapaian tujuan suatu organisasi.
2. Adalah sebuah dasar perbandingan fungsi manajeman yang lain yaitu pengarah Organisasi, koordinasi dan pengawasan.
3. Merupakan suatu fungsi dari setiap individual yang berada dalam organisasi,

Baik horizontal maupun vertikal.

4. Efisien, maksudnya yaitu apabila mampu melaksanakan rencana tersebut akan Tercapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Menurut Allen dalam Aneta dkk (2018) bahwa kegiatan pada fungsi perencanaan adalah sebagai berikut :

(a) Meramalkan

(b) Menetapkan maksud dan tujuan

(c) Mengacarakan

(d) Menyusun tata waktu

(e) Menyusun anggaran belanja

2.3. Pengertian Abrasi

Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Baik itu, gelombang air laut atau pasang surut air laut, kedua-duanya sama-sama memiliki sifat merusak. Oleh karena itu, tanah pada garis pantai akan rusak jika secara terus menerus terkena gelombang air laut dan pasang surut air laut Abrasi yang disebabkan karena faktor alam (pasang surut air laut dan gelombang laut) akan selalu terjadi. Meskipun begitu, kita tetap masih bisa mengurangi kerusakan pesisir pantai karena abrasi. Dengan meminimalisir dampak kerusakan tersebut, maka pengikisan tanah pada pesisir pantai tidak menyusut atau berkurang secara signifikan.

Abrasi pantai yaitu kerusakan garis pantai dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus dihantam oleh gelombang laut dan disebabkan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen

diperaira Kusumawati dalam (Khofifah dkk 2024). Abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi atau kata lain biasa disebut erosi pantai. Kerusakan garis pantai tersebut dikarenakan terganggunya keseimbangan alam daerah dipantai tersebut. Abrasi ini dapat terjadi kerena beberapa faktor antara lain, faktor alam, faktor manusia, dan salah satu untuk mencegahnya tejadinya abrasi tersebut yakni melakukan penanaman hutan mangrove (Noya dkk 2023)

Abrasi pantai adalah kerusakan garis pantai yang diakibatkan dari terlepasnya materil pantai, seperti pasir atau lempeng yang terus menurus di hantam oleh gelombang air laut atau dikarnakan terjadinya perubahan keseimbangan yang berada di perairan pantai. Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ketempat yang lainnya. Adapun menurut Fajar menyatakan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga dengan erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipicu oleh keseimbagangan alam daerah tersebut.

Dari beberapa pengertian-pengertian abrasi diatas dapat disimpulkan, bahwa abrasi adalah proses pengikisan tanah di garis pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus, dan pasang surut air laut. Meskipun abrasi tidak dapat dihindari, kerusakan dapat dikurangi dengan melakukan upaya untuk mengurangi dampak kerusakan.

Menurut Noya dkk (2023) abrasi adalah fenomena alam yang selalu menjadi masalah besar di lingkungan pantai. Proses terjadinya abrasi dibagi menjadi dua faktor yaitu :

a) Faktor Alam

Proses terjadinya abrasi di karenakan faktor alam disebabkan ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. Arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang lama kelamaan mengerus pinggiran pantai. Gelombang di sepanjang pingiran pantai mengetarkan atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadinya badai sehingga dapat mempercepat terjadinya proses abrasi.

b) Faktor Manusia

Aktifitas manusia di pesisir mengakibatkan cepatnya pantai mengalami abrasi. Aktifitas manusia diantaranya : pengerusakan terumbu karang, penebangan mangrove, penambangan pasir pantai dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

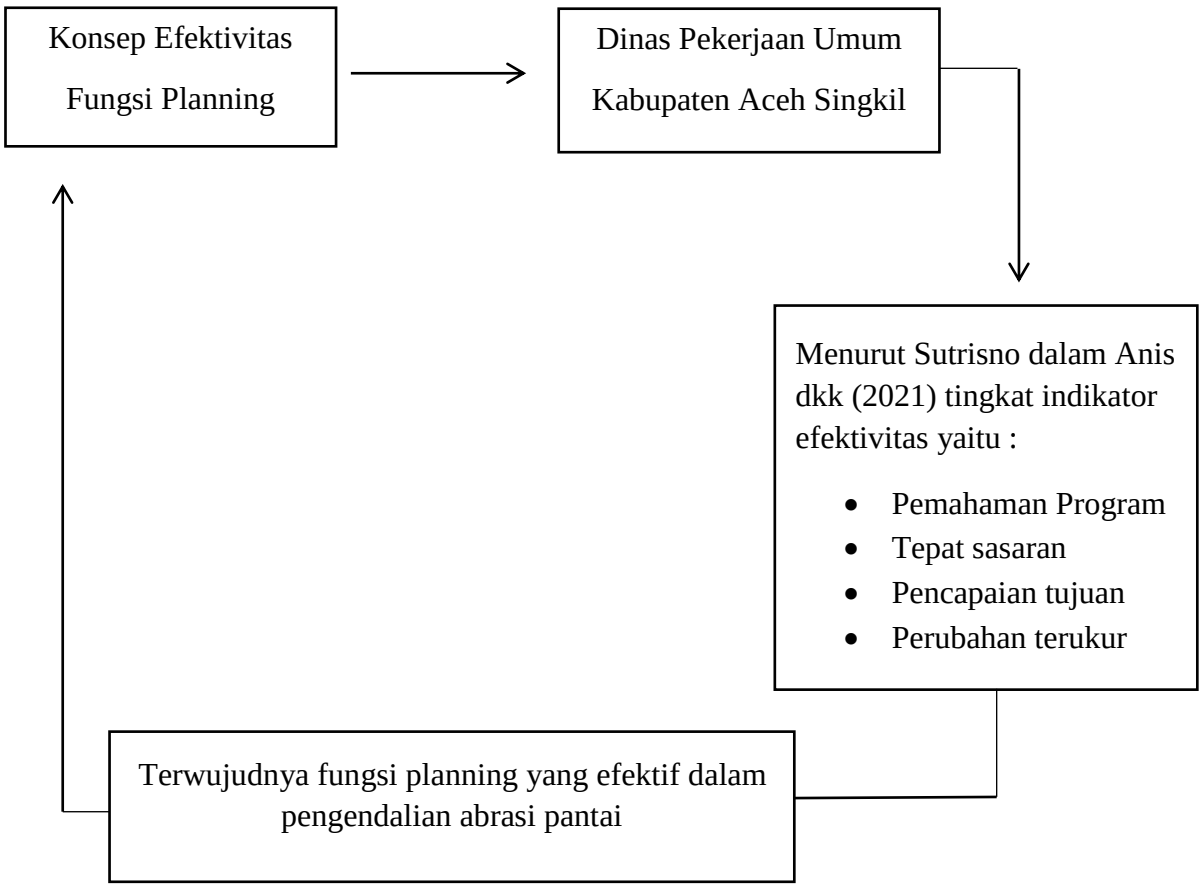
3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Menurut Sugiyono dalam (Innuddin dkk 2023) metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dapat disimpulkan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.

Sedangkan Izharsyah (2022) Mendefinisikan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif yang merupakan prsedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan keadaan sekitar dengan objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada pada sekarang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hunowu dalam Innuddin, 2023)

3.2. Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dilakukan dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

a. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan metode, strategi, dan sumber daya yang ada. Dalam konteks pengendalian abrasi pantai, efektivitas mengacu pada kemampuan strategi atau kebijakan yang diterapkan untuk mencegah atau mengurangi proses erosi di sepanjang pantai, serta mempertahankan kestabilan ekosistem pesisir.

b. Perencanaan adalah proses untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang terstruktur guna mencapai tujuan tertentu. Dalam pengendalian abrasi, perencanaan mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah abrasi pantai, serta menentukan solusi yang optimal dengan mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi, dan sosial.

c. Pengendalian abrasi pantai adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan proses erosi yang terjadi pada garis pantai, dengan menggunakan berbagai pendekatan teknis dan non-teknis, seperti pembangunan struktur perlindungan pantai.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Dalam penelitian ini melihat perencanaan melalui penjabaran kategorisasi penelitian.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini di dasari oleh pendapat Sutrisno dalam Anis dkk (2021) diantaranya :

1. Pemahaman Program
2. Tepat sasaran
3. Pencapaian tujuan
4. Perubahan terukur

3.5. Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan informan/ narasumber sebagai oaring yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Heryana, (2018) mendefinisikan informan adalah sebuah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informan yang diberikan, yaitu tentang Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil.

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama	Jabatan
1.	Hamzah Fansuri, ST.	Kabid Pengairan
2.	Kurniawansyah, ST.,M. Eng.	Kasie Pembangunan dan Pengendalian Irigasi
3.	Asmaruddin, BP.,ST.	Kasie Pengendalian Sungai, Waduk, Danau dan Pantai
4.	H. Ismail Saleh Lubis	Wiraswasta

Tabel 4.2.

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	40 Tahun	1	25%
2.	45 – 50 Tahun	2	50%
3.	60 Tahun	1	25%
	Jumlah	4	100%

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	laki – laki	4	100%

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Sarjana	2	50%
2.	Pasca Sarjana?Magister	1	25%
3.	SMA	1	25%
	Jumlah	4	100%

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sahir (2022) Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika pengumpulkan data akan sia-sia.

Dalam penelitian ini, teknik atau metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh langsung ditempat penelitian melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan mendatangi narasumber atau kry informant dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder di lakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah di olah dengan baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari intansi terkait.

b) Wawancara, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.

2. Data Sekunder

Dalam data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis dan gambar. Adapun cara dalam pengumpulan data ini yaitu:

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder di lakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah di olah dengan baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari intansi terkait.

b) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

c) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumbersumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknis Analisis Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah selnjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data. Salah satu model analisis data menurut (Huberman dalam Sustiyo dkk, 2019). Untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif, dibantu dengan alat-alat elektronik. Menurut Hubermen dalam Sustiyo dkk (2019) langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan agar lebih mudah dikelola. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang penting, mengabaikan yang tidak relevan, dan menyusun data agar lebih fokus dan ringkas. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian, hingga data dapat tersusun dengan jelas untuk dianalisis lebih lanjut.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah dipilih dan diringkas disusun dalam format tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian ini bisa berupa tabel, grafik, atau narasi yang memungkinkan peneliti melihat pola dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas.

Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan dan menentukan langkah atau keputusan selanjutnya.

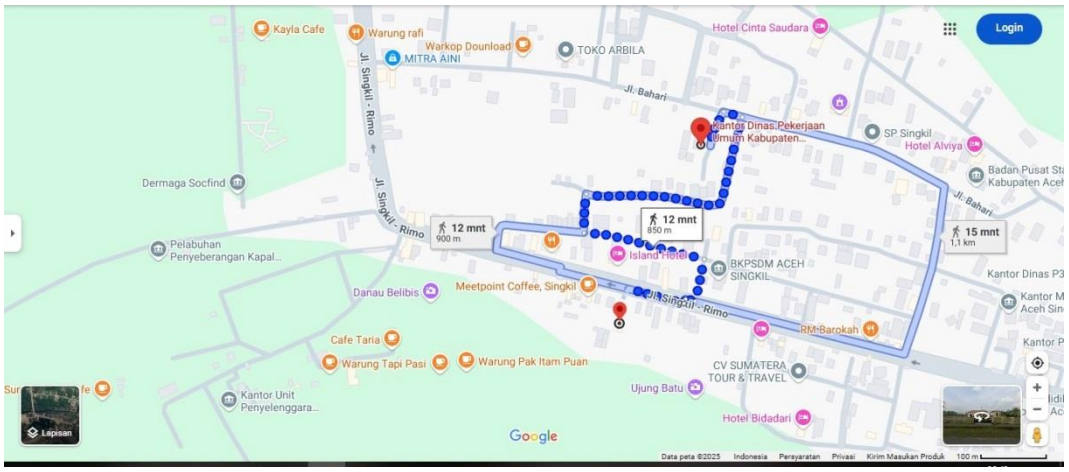
c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam menganalisis data, di mana peneliti mencari makna dari data yang telah disajikan. Proses ini melibatkan identifikasi pola atau tema, pengelompokan data yang serupa, dan akhirnya, merumuskan kesimpulan. Kesimpulan ini disajikan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami, serta mengacu pada inti permasalahan yang diteliti.

3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Jl. As Sayuthi No. 60 Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok Kec. Singkil Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Maret Sampai April 2025.

Gambar 3.3. Peta Lokasi Penelitian



Sumber : Google Maps 2025

Gambar 3.4 Pantai Wisata Danau Belibis



Sumber : Penulis 2025

3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil

Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil salah satu lembaga teknis di daerah ini dan bertanggungjawab atas perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur fisik dan tata ruang. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah, khususnya di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, dan pengelolaan sumber daya air. Gambaran umum Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas ini berperan penting dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan ruang wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil ini resmi berdiri pada 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan. Peresmian kabupaten dilakukan pada 14 Mei 1999 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh di lapangan Sultan Daulat Singkil.

Gambar 3.5 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil



Sumber :
(https://www.google.com/maps/place/Kantor+Dinas+Pekerjaan+Umum+Kabupaten+Aceh+Singkil)

3.9.2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas PUPR

a. Visi

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan menuju Kabupaten Aceh Singkil yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Misi

1. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar.
2. Mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan perumahan.
3. Mengelola sumber daya air dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3.9.3. Tugas Pokok Yang Terlibat Dalam Pengendalian Abrasi

1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil

Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kebijakan teknis, program, serta kegiatan strategis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk penanggulangan abrasi pantai.

2. Sekretariat Dinas

Mengelola administrasi dan keuangan serta mendukung kelancaran operasional kegiatan teknis, termasuk proyek pengendalian abrasi.

3. Bidang dan Seksi Teknis

A. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Merupakan bidang utama yang menangani langsung pengendalian abrasi.

a. Seksi Perencanaan dan Program SDA

Merancang program dan perencanaan teknis pengamanan pantai serta mengidentifikasi daerah rawan abrasi.

b. Seksi Pelaksanaan SDA

Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik pengendalian abrasi seperti pembangunan tanggul, pemecah gelombang (*breakwater*), dan *revetment.*

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA

Memantau kondisi bangunan pengaman pantai, melakukan perawatan, dan evaluasi keberlanjutan infrastruktur pengendali abrasi.

B. Bidang Tata Ruang

Berperan dalam mendukung penanganan abrasi dari aspek pengaturan ruang dan peruntukan lahan pesisir.

a. Seksi Penataan Ruang Wilayah

Menyusun dan menyesuaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) agar kawasan pesisir memiliki perlindungan dan zona konservasi.

b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Mengawasi agar pemanfaatan ruang di wilayah pesisir tidak melanggar ketentuan zonasi, yang bisa memperparah abrasi.

C. Bidang Jasa Konstruksi

Mendukung dari sisi pengawasan pelaksanaan proyek dan standarisasi teknis pekerjaan, Memastikan proyek pengamanan pantai dikerjakan sesuai standar mutu dan prosedur konstruksi yang berlaku.

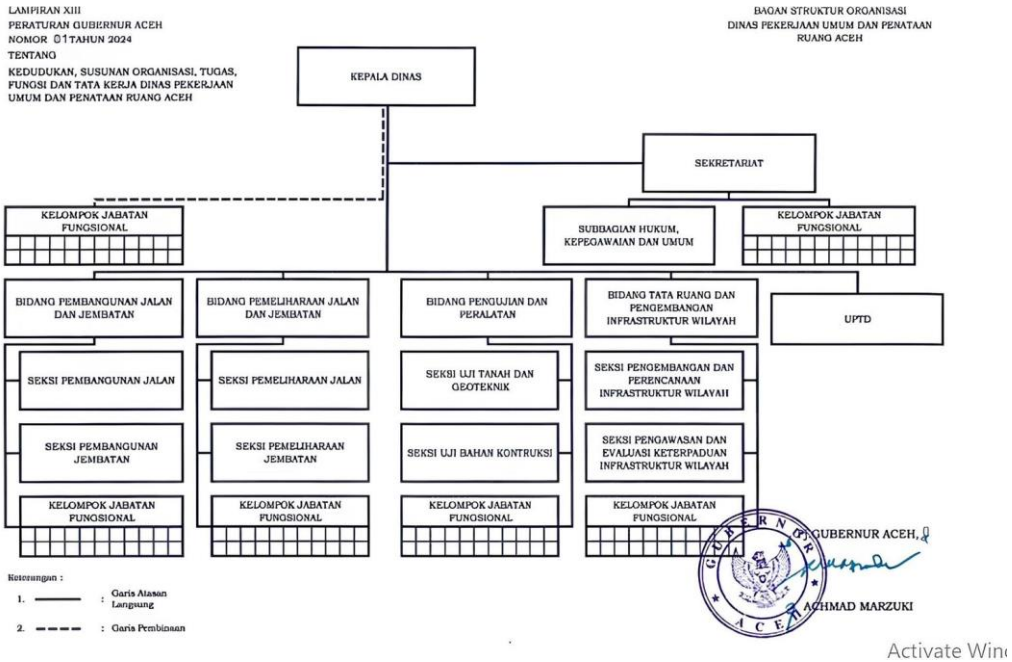
D. Bidang Bina Marga (Pendukung)

Tidak terlibat langsung dalam konstruksi pengaman pantai, namun mendukung aksesibilitas ke lokasi proyek.

a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Menyediakan rencana dan akses jalan ke wilayah pesisir yang menjadi lokasi kegiatan pengendalian abrasi.

3.9.4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil



Activate Win

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi,dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungsi planning pada dinas pekerjaan umum dalam upaya pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil yang disajikan di bawah ini merupakan temuan yang di peroleh dari berbagai narasumber terkait, termasuk pihak Dinas Pekerjaan Umum serta masyarakat setempat.

4.1.1. Adanya Pemahaman Program

Pemahaman program adalah sejauh mana individu atau kelompok sasaran mengetahui, mengerti, dan mampu menjelaskan isi, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan suatu program disebut pemahaman program. Pemahaman ini mencakup elemen kognitif seperti pengetahuan tentang program dan kemampuan untuk menafsirkan dan mengaitkan informasi program dengan situasi tertentu. Perencanaan yang baik dipahami oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan pelaksana teknis. Jika orang benar-benar memahami tujuan program, seperti pengendalian abrasi melalui tanggul, maka itu menunjukkan bahwa fungsi perencanaan telah berjalan dengan baik karena hasil perencanaan dikomunikasikan, disosialisasikan, dan diterjemahkan dengan baik ke lapangan.

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman program pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, peneliti melakukan wawancara dengan baik dengan pihak pihak terkait. informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam menilai efektivitas pengendalian abrasi sebagai bagian faktor penting dalam mendukung pelaksanaan yang berhasil dan berkelanjutan pengendalian abrasi di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi Pada Senin, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Saya sudah tahu bahwa program, termasuk penanaman mangrove dan pembangunan tanggul, sudah mulai dijalankan. Namun, saya pikir implementasinya belum optimal. Beberapa wilayah masih belum ditangani, dan struktur yang sudah ada mulai hancur sebagian. Kami berharap pemerintah menangani masalah ini dengan lebih serius, karena abrasi di sini semakin mengkhawatirkan."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi pada Senin, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Saya pikir pemerintah sudah mulai berusaha untuk mengendalikan abrasi di Danau Belibis, terutama setelah masyarakat menyuarakan keluhan beberapa tahun terakhir. Kami menyaksikan pembangunan tanggul dan penanaman pohon mangrove di beberapa lokasi yang rentan terhadap abrasi. Namun, menurut pendapat saya, program ini masih belum menyentuh semua masalah dan belum merata. Beberapa wilayah pantai masih terkikis, menimbulkan ancaman bagi lahan pertanian dan rumah warga. Kadang-kadang juga dilakukan terlalu*

> *lambat, misalnya baru dilakukan setelah kerusakan menjadi lebih parah. Karena masyarakat di sini sangat bergantung pada tanah dan pantai ini untuk kehidupan sehari-hari, kami berharap program ini lebih cepat dan lebih menyeluruh. Hasilnya mungkin lebih optimal jika ada koordinasi antar instansi yang lebih baik dan anggaran yang cukup."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi pada Senin, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Menurut pendapat saya, pelaksanaannya sudah ada, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Meskipun pemerintah telah menanam mangrove dan membangun tanggul dalam beberapa tahun terakhir, tindakan ini belum merata di semua daerah yang terkena dampak yang parah. Abrasi masih mengikis tanah di tempat kami ini dan mendekati rumah warga. Kami sering khawatir tentang gelombang tinggi. Oleh karena itu, harapan kami untuk masa depan adalah program dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan bahwa masalah yang belum ditangani segera ditangani."*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Pertama, masyarakat tidak memahami pentingnya pengendalian abrasi. Banyak orang belum menyadari efek abrasi jangka panjang pada kehidupan dan lingkungan mereka. Kedua, tidak ada solialisasi yang masif dan konsisten. Meskipun dinas memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya, program sosialisasi kami masih terbatas. Terkadang masyarakat bahwa tidak menerima semua informasi.*

> *Ketiga, orang percaya bahwa pemerintah adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas program pengendalian abrasi, padahal program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam menjaga lingkungan sekitar dan menghindari tindakan yang mempercepat kerusakan pantai."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi pada Senin, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

> *"Menurut pendapat saya, pemerintah atau dinas terkait harus memberikan sosialisasi yang lebih rutin dan jelas agar masyarakat lebih memahami program pengendalian abrasi ini. Jangan hanya datang sekali, tetapi harus terus datang. Ada saat-saat ketika warga lokal tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang program, tanggal pelaksanaannya, dan potensi tindakan masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dinas Pekerjaan Umum telah mengambil inisiatif untuk mengendalikan abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, terutama di daerah Pantai Danau Belibis, yang sangat rentan terhadap abrasi akibat perubahan iklim, gelombang laut, dan pasang besar. Penanaman vegetasi mangrove, pembangunan tanggul penahan ombak, dan pemetaan titik rawan abrasi adalah semua upaya yang telah dilakukan. Namun, program masih menghadapi banyak masalah saat dijalankan. Ini termasuk anggaran yang terbatas, kondisi geografis yang sulit, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian abrasi. Masyarakat belum memahami peran dinas dalam mendukung program ini karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan. Selain itu, masih ada orang yang percaya bahwa pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab

untuk menangani abrasi. Untuk mencapai hal ini, sosialisasi yang teratur, terstruktur, dan berbasis partisipasi diperlukan. Metode ini mencakup workshop dan instruksi teknis. Selain itu, mereka juga menggunakan media pembelajaran seperti brosur, infografis, dan video. Diperlukan pula koordinasi lintas sektor agar semua pihak yang terlibat dalam pengendalian abrasi pantai secara berkelanjutan dapat bekerja sama dengan lebih baik.

4.1.2. Adanya Program Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu program atau kebijakan telah menjangkau kelompok atau wilayah yang sebenarnya menjadi target. Indikator ini memastikan bahwa sumber daya, intervensi, dan keuntungan program benar-benar dirasakan oleh pihak yang membutuhkan atau terdampak langsung. Pengendalian abrasi pantai mencakup berbagai proses, seperti menemukan kebutuhan, menentukan wilayah mana yang paling mungkin terkena abrasi, membuat strategi teknis, dan membagi sumber daya.

Untuk mengetahui sejauh mana tepat sasaran pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, peneliti melakukan wawancara dengan baik dengan pihak pihak terkait. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam menilai keberhasilan program, menemukan kesesuaian antara target dan penerima manfaat, dan mengevaluasi apakah tindakan yang diambil benar benar memberikan dampak langsung pada masyarakat dan wilayah yang terdampak abrasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Perencanaan kami dimulai dengan melacak daerah yang paling terdampak abrasi, biasanya melalui survei lapangan dan laporan dari masyarakat atau pemerintah desa. Setelah itu, kami melakukan kajian teknis bersama tim ahli untuk menentukan jenis penaganan yang tepat, seperti pemecah ombak, pembangunan tanggul, atau revegetasi pantai. Selain itu, temuan penelitian ini dmasukkan ke dalam perencanaan program tahunan kami dan diajukan untuk dukungan anggaran dalam musrenbang."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Kurniawansyah selaku Kasie Pembangunan dan pengendalian irigasi pada Selasa, 24 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

> *"Ada beberapa komponen utama,pertama survei lapangan dan data teknis yang akurat, yang merupakan dasar dari semua perencanaan. Yang kedua anggaran yang cukup dari pemerintah dan ketiga koordinasi yang baik antarinstansi terkait. Yang juga penting adalah partisipasi masyarakat pesisir dalam program yang dirancang."*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk studi teknis dan pelaksanaan program, serta ketersediaan data dasar seperti topografi pantai, dan peta kerentanan abrasi, adalah kendala utama yang kami hadapi. Selain itu koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan,*

> *khususnya terkait dengan integrasi program antara instansi terkait. Membuat perencanaan yang komprehensif menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah masyarakat pesisir tidak menyadari dampak abrasi dan pentingnya mempertahankan kawasan pesisir."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid Pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"ada beberapa hambatan yang pertama ada keterbatasan anggaran yang menghalangi perencanaan dan pelaksanaan. Kedua, tidak ada data teknis yang akurat, seperti peta pesisir dan informasi tentang gelombang dan arus laut. Ketiga koordinasi antarinstansi yang buruk menyebabkan program kadang-kadang tidak sinkron. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah, dan kami kekurangan ahli dalam pengendalian abrasi. Semua elemen ini saling berhubungan dan berdampak pada beberapa efektif perencanaan."*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawansyah selaku Kasie pembangunan dan pengendalian irigasi pada selasa, 24 Maret 2025 Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"kami dari Dinas Pekerjaan Umum jelas tidak bekerja sendiri ketika berbicara tentang keterlibatan pihak-pihak terkait. Kami melibatkan banyak lembaga dan individu dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dalam proses pengendalian abrasi pantai. Misalnya Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) untuk memastikan bahwa program dan anggaran kami sesuai dengan satu sama lain. Kami juga melibatkan masyarakat pesisir, terutama saat mencari lokasi abrasi yang penting. Terutama saat mencari lokasi*

> *abrasi yang penting. Agar data yang kami kumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan, kami sering turun kelapangan bersama kepala desa dan tokokh masyarakat setempat."*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi pada Senin, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

> *"Menurut Pribadi saya percaya bahwa program itu sudah melakukan hal-hal yang baik dengan menanam mangrove dan membangun tanggul. Namun, saya tidak yakin sepenuhnya tentang relevansinya. Contohnya, beberapa daerah masih rawan abrasi tetapi belum ditangani, dan beberapa struktur dibangun dengan cara yang kurang kuat dan dapat rusak dengan cepat. Selain itu, meskipun kami yang paling memahami situasi di sini, masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, programnya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri yang sebenarnya."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Menurut wawancara yang dilakukan dengan orang-orang di daerah yang terkena dampak abrasi di sekitar Danau Belibis, Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan bahwa inisiatif untuk mengendalikan abrasi pantai telah diketahui dan mulai dilaksanakan, terutama melalui pembangunan tanggul dan penanaman mangrove. Namun, masyarakat menganggap implementasinya belum optimal. Beberapa area masih belum ditangani, dan infrastruktur yang telah dibangun mulai rusak. Masyarakat mengatakan bahwa program seringkali lambat dan tidak merata dilaksanakan. Akibatnya, ada wilayah yang masih mengalami abrasi yang parah, yang mengancam lahan pertanian dan permukiman warga. Sebaliknya, tantangan

tersendiri adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Karena kurangnya informasi tentang tujuan, manfaat, dan cara program dijalankan, masyarakat tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mereka berpartisipasi secara aktif.

4.1.3. Adanya Program Dalam Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah hasil akhir yang menunjukkan bahwa suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan adalah jalan atau hasil yang ingin dicapai, sementara pencapaian tujuan menunjukkan realisasi atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Sejauh mana hasil dari implementasi perencanaan dapat memenuhi tujuan program pengendalian abrasi pantai disebut pencapaian tujuan.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak pihak terkait. Informasi yang di peroleh menjadi dasar dalam menilai efektifitas program dan sejauh mana tujuan yang telah di rencanakan dapat dicapai secara efektif di lapangan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *“Perencanaan dimulai dengan menentukan wilayah yang terdampak abrasi. Kemudian tim dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan teknis. Dokumen perencanaan, seperti DED dan RAB, disusun sebagai dasar pengajuan anggaran. Selain itu, kami bekerja sama dengan Bappeda untuk memastikan bahwa program ini menjadi prioritas daerah dan melibatkan masyarakat melalaui sosialisasi untuk*

memastikan perencanaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tujuan kami adalah penanganan abrasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan."

Selanjutnya hasil wawancara dengan Asmaruddin selaku Kasie Pengendalian sungai, waduk, danau dan pantai pada Selasa, 24 Maret 2025 pukul 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

"program pengendalian abrasi pantai membutuhkan dukungan masyarakat. Masyarakat pesisir harus terlibat dalam program dari perencanaan hingga pelaksanaanya. Masyarakat harus dididik tentang efek abrasi dan pentingnya menjaga lingkungan pesisir mereka juga dapat membantu dalam pengawasan dan menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Program yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum akan lebih efektif dan berkelanjutan jika masyarakat terlibat aktif."

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmaruddin selaku Kasie Pengendalian sungai, waduk, danau dan pantai pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 11:30 WIB beliau mengatakan bahwa:

"Menurut pelaksanaan saat ini, program ini telah memberikan manfaat, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Misalnya, kita telah melihat penurunan laju abrasi di beberapa lokasi penting berkat penanaman mangrove dan pembangunan tanggul penahan gelombang. Tetapi karena keterbatasan anggaran dan kendala teknis di lapangan, masih ada beberapa area yang belum diatasi secara menyeluruh. Manfaatnya juga mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah yang sebelumnya sangat rentan terhadap gelombang. Agar program ini berhasil dalam jangka panjang, tentu saja kita perlu perencanaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan."

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid Pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 pukul 10.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

> *"Agar masyarakat pesisir memahami pentingnya program dan mendukungnya, kami mulai bekerja sama dengan mereka melalui sosialisasi dan forum diskusi terbuka. Selain itu, kami secara teratur mengamati daerah yang rawan abrasi dan kemudian memperbaikinya dengan pembangunan fisik seperti membangun bronjong, tanggul pemecah ombak, dan penanaman vegetasi pantai. Selain itu, melalui jalur informal dan musrenbang, kami menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar program disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk membuat program yang dijalankan lebih tepat sasaran, kami juga meminta pihak ketiga dan akademisi untuk melakukan penelitian teknis. Kami melakukan tindakan ini agar masyarakat tidak hanya merasa terlibat, tetapi juga merasa dilayani sepenuhnya."*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:30 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *"Secara keseluruhan, program pengendalian abrasi pantai yang telah kami laksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menguntungkan. Tujuan awalnya adalah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di wilayah pesisir serta melindungi pemukiman warga dan infrastruktur dari dampak abrasi. Sejauh ini, tanggul atau pemecah ombak telah dibangun di beberapa titik yang sangat penting untuk mengurangi laju abrasi. Kami juga menyadari bahwa, karena keterbatasan anggaran dan luasnya garis pantai yang harus dilindungi, belum mungkin untuk menangani secara menyeluruh semua wilayah yang terdampak. Oleh karena itu, tujuan awal program sebagian besar telah dicapai, tetapi*

kami masih melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan untuk memastikan bahwa program ini berfungsi dengan baik dalam jangka panjang."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, merencanakan pengendalian abrasi pantai secara bertahap. Ini dimulai dengan mengidentifikasi wilayah yang terdampak melalui survei dan laporan masyarakat, kemudian melakukan penelitian teknis untuk menentukan jenis penanganan yang tepat. Kajian ini dimasukkan ke dalam program tahunan dan dibahas di forum musrenbang. Perencanaan ini membutuhkan data teknis yang akurat, dukungan anggaran, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Namun, ada beberapa hambatan dalam proses ini, seperti kurangnya anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan tenaga kerja. Program ini dinilai telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat pesisir. Selain itu, berbagai kelompok dari tingkat daerah hingga pusat telah terlibat dalam organisasi yang terkait. Untuk membuat pengendalian abrasi ke depan lebih efisien dan merata, upaya terus dilakukan, termasuk penyesuaian teknologi dan menerima masukan dari masyarakat.

4.1.4. Adanya Program Kegiatan Yang Terukur

Kegiatan terukur adalah alat atau ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Indikator ini harus spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki batas waktu. Perubahan terukur adalah alat atau ukuran yang dapat diukur secara sistematis dan digunakan untuk menilai dan membuktikan bahwa

suatu perubahan telah terjadi secara nyata. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, indikator ini menunjukkan seberapa besar program, kebijakan, atau kegiatan telah menghasilkan dampak atau hasil yang nyata. Perubahan yang diukur sangat penting untuk menilai efektifitas fungsi perencanaan karena memberikan bukti nyata tentang bagaimana perencanaan dilakukan. Jika tidak ada perubahan yang dapat diukur, perencanaan hanyalah dokumen atau teori yang tidak berhasil di dunia nyata.

Untuk mengetahui sejauh mana perubahan terukur dari pelaksanaan program pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak pihak terkait. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja fungsi perencanaan melalui pengukuran perubahan, seperti kondisi garis pantai yang lebih baik, pengurangan dampak abrasi terhadap permukiman, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

> *“Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menentukan seberapa efektif program pengendalian abrasi pantai. Pertama, kami melihat dari segi teknis bagaimana konstruksi penahan abrasi seperti batu gajah, talud, atau vegetasi pantai dapat mengurangi laju abrasi di daerah terdampak. Kemudian, kami juga melakukan evaluasi berdasarkan bagaimana abrasi mengurangi dampak terhadap pemukiman penduduk, infrastruktur umum, dan lahan produktif di sekitar pantai. Selain itu, kami menghitung tingkat kepuasan*

masyarakat dengan melakukan survei atau berbicara dengan mereka di forum. Program ini berhasil jika masyarakat merasa lebih aman dan tidak lagi khawatir akan abrasi. Terakhir, keberhasilan juga diukur dari efektivitas anggaran, yaitu apakah jumlah uang yang digunakan sebanding dengan hasil yang dihasilkan bagi masyarakat."

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawansyah selaku Kasie Pembangunan dan pengendalian irigasi pada Selasa, 24 Maret 2025 Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

"Secara keseluruhan, ada beberapa hambatan utama yang kami hadapi. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi masalah besar. Program pengendalian abrasi membutuhkan biaya yang cukup besar, dan dana dari APBD dan pusat masih terbatas, dan mereka harus bersaing dengan program prioritas lainnya. Ketiga, partisipasi masyarakat masih jauh dari yang ideal. Meskipun sebagian masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya mempertahankan lingkungan pesisir, masih ada yang belum terlibat secara aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas pengaman pantai yang telah dibangun. Terakhir, perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga menjadi penghalang. Kadang-kadang abrasi terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan karena badai atau gelombang tinggi, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir dan menghambat program."

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmaruddin selaku kasie pengendalian sungai, waduk, danau dan pantai pada Selasa, 24 Maret 2025 pukul 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa:

"Beberapa indikator menunjukkan seberapa efektif pengendalian abrasi pantai. Ini termasuk laju abrasi yang lebih rendah di wilayah pesisir yang menjadi lokasi proyek, peningkatan perlindungan terhadap

pemukiman dan fasilitas umum, dan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat pesisir dengan hasil pekerjaan. Selain itu, kami mengevaluasi ketahanan struktur yang dibangun, seperti tanggul atau breakwater, untuk jangka waktu tertentu. Untuk mengukur keberhasilan program, evaluasi teknis rutin dan monitoring pasca pelaksanaan juga sangat penting."

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ismail Saleh Lubis selaku masyarakat yang terkena dampak abrasi pada Selasa, 23 Maret 2025 pukul 11.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

"Masyarakat setempat sangat merasakan dampak abrasi pantai di Pantai Danau Belibis. Pertama, dari sudut pandang lingkungan, abrasi telah secara bertahap mengikis tanah, mengurangi luas lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Bahkan beberapa rumah warga di dekat garis pantai sekarang terancam rusak atau perlu direlokasi. Kedua, infrastruktur desa juga terpengaruh oleh abrasi. Air laut mulai mengganggu beberapa jalan dan fasilitas umum dekat pantai. Ini jelas menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketiga, masyarakat yang bergantung pada pariwisata dan perikanan lokal mengalami penurunan penghasilan. Perubahan garis pantai dan kerusakan ekosistem di sekitarnya, seperti hilangnya vegetasi pantai, mempengaruhi hasil tangkapan nelayan dan menurunkan daya tarik wisata."

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Fansuri selaku Kabid pengaraian pada Senin, 24 Maret 2025 Pukul 10:00 WIB beliau mengatakan bahwa:

"Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, telah

berusaha keras untuk mengatasi abrasi di Pantai Danau Belibis. Masyarakat tentu mengharapkan agar abrasi dapat dihentikan atau setidaknya diminimalkan. Sejauh ini, beberapa proyek penahan ombak dan pemulihan vegetasi pantai telah menghasilkan hasil yang positif. Namun, sebagian orang tetap percaya bahwa penanganannya belum menyeluruh dan masih ada titik rawan yang belum ditangani. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi telah memenuhi harapan masyarakat, meskipun cakupan dan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa program pengendalian abrasi pantai Dinas Pekerjaan Umum di Aceh Singkil, khususnya di Pantai Danau Belibis, telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih ada beberapa masalah. Dari perspektif teknis, terbukti bahwa pembangunan struktur seperti revegetasi pantai, batu gajah, dan tanggul dapat mengurangi laju abrasi sambil melindungi pemukiman, infrastruktur, dan lahan produktif. Salah satu indikator penting adalah kepuasan masyarakat, di mana sebagian besar orang merasa aman dan terlindungi. Namun demikian, ada beberapa hambatan utama. Ini termasuk keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang rendah dalam menjaga fasilitas, dan dampak perubahan iklim yang menyebabkan abrasi lebih cepat dari yang diantisipasi. Penyebaran abrasi menyebabkan kehilangan lahan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan pendapatan dari perikanan dan pariwisata. Secara keseluruhan, harapan masyarakat telah dipenuhi, meskipun program belum secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah terdampak. Untuk memperkuat ketahanan pesisir terhadap abrasi di masa depan, diperlukan

peningkatan cakupan dan kesinambungan program serta keterlibatan aktif masyarakat.

4.2. Pembahasan

Di bagian ini hasil dari penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian.

4.2.1. Adanya Pemahaman Program Pengendalian Abrasi

Menurut Sutrisno dalam Anis dkk (2021) menyatakan bahwa pemahaman proses perbuatan cara memahami pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman program mengukur tingkat efektivitas dalam pemahaman program dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana tujuan program dapat dipahami dan diterima oleh sasaran program, serta bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka berubah sesuai dengan maksud program tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, sejauh mana masyarakat yang dituju untuk program pengendalian abrasi pantai memahami, menerima, dan menanggapi tujuan program tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaan teknis seperti pembangunan tanggul atau penanaman mangrove, tetapi juga dari pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mendukung, menjaga, dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian abrasi pantai. Jika masyarakat memahami tujuan program, seperti menjaga ekosistem pantai dan efek abrasi, mereka akan berubah. Mereka akan bertindak dengan tidak merusak

mangrove, berpartisipasi dalam kegiatan penanaman, atau mendukung kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif program pengendalian abrasi.

Selain itu, diperkuat dengan teori Munandar (2020) menyatakan bahwa pemahaman program mencakup pemahaman terhadap enam indikator utama: tujuan, input, proses, *output*, *outcome*, dan evaluasi. Keenam aspek ini menjadi kerangka yang kokoh untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan program. Dalam konteks pengendalian abrasi pantai diperlukan untuk memahami suatu program tujuan, input, proses, ouput, dan evaluasi. kelima indikator ini menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas program pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil. Melindungi wilayah pesisir dari kerusakan dan dampak lingkungan adalah tujuan pengendalian abrasi. Sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, tenaga teknis, dan data lokasi, adalah input. Proses menunjukkan bagaimana kegiatan dilakukan dari tahap perencanaan hingga pembangunan fisik. Hasilnya dapat dilihat secara langsung, seperti panjang tanggul yang dibangun. Hasil menunjukkan efek yang nyata, seperti penurunan kerusakan pantai dan peningkatan rasa aman masyarakat. Sebuah evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program dan memberikan dasar untuk perbaikan berikutnya. Metode ini memungkinkan penilaian menyeluruh dan objektif atas keberhasilan program pengendalian abrasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami program,

meskipun upaya teknis seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul telah dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat partisipasi yang rendah, serta keyakinan bahwa pengendalian abrasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Indikator pemahaman program seperti pengetahuan, sikap, dan tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa sasaran belum memahami program sepenuhnya. Akibatnya, strategi sosialisasi yang lebih efisien dan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program.

Dari sisi pengendalian, Dinas Pekerjaan Umum bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sementara BNPB memberikan dukungan keuangan, perencanaan mitigasi, dan penguatan kapasitas masyarakat, DPU menangani pelaksanaan teknis seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul penahan ombak. Awal kerja sama ini adalah dengan mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap abrasi dan membuat rencana untuk mencegah abrasi. Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, DPU dan BNPB juga melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa abrasi di beberapa wilayah yang ditangani sudah menurun. Sementara mangrove mulai tumbuh dan memperkuat garis pantai, tanggul dibangun untuk menahan gelombang besar. Tetapi masih ada beberapa hambatan, seperti keterbatasan dana dan penanganan yang belum merata di semua wilayah yang terdampak. Meskipun demikian, program ini secara umum cukup efektif karena tepat sasaran, melibatkan masyarakat, dan mengurangi risiko abrasi.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi pihak pihak yang terlibat terutama masyarakat sasaran harus memahami tujuan program pengendalian

abrasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami tujuan dan keuntungan dari program seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul serta mengubah sikap, pengetahuan, dan tindakan mereka untuk mendukung program tersebut. Semakin luas pemahaman masyarakat tentang program pengendalian abrasi, semakin besar kemungkinan program berjalan efektif. Ini karena program tidak hanya dipahami secara informasi, tetapi juga diterima dan diinternalisasi dalam tindakan nyata yang mendukung pengendalian abrasi yang berkelanjutan.

4.2.2. Adanya Efektivitas Program Yang Tepat Sasaran Dalam Pengendalian Abrasi

Menurut Sutrisno dalam Anis dkk (2021), tepat sasaran adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah menjangkau kelompok sasaran yang benar atau area yang menjadi target utama. Indikator ini menunjukkan apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran, dan apakah pihak yang membutuhkannya benar-benar merasakan manfaatnya. Dalam hal efektivitas fungsi planning, indikator tepat sasaran membantu memastikan bahwa perencanaan program seperti pengendalian abrasi pantai benar-benar diarahkan pada masyarakat dan wilayah yang paling terdampak oleh intervensi.

Berdasarkan teori tersebut, kita dapat mengetahui seberapa tepat sasaran program pengendalian abrasi pantai dengan melihat seberapa banyak perhatian program tersebut diberikan pada wilayah pesisir yang paling terdampak abrasi. Wilayah pesisir pantai Danau Belibis di Kabupaten Aceh Singkil adalah

salah satu contohnya. Melindungi pemukiman warga yang terancam, melibatkan masyarakat lokal dalam program seperti penanaman vegetasi atau pembangunan tanggul, dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap aset lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat pesisir adalah bukti bahwa program ini tepat sasaran. Program ini juga memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara langsung dan menyediakan solusi berkelanjutan dan relevan, yang menunjukkan ketepatan sasaran.

Hal ini diperkuat dengan teori Mardiasmo (2018) yang menyatakan Tepat sasaran adalah kondisi di mana suatu program atau kegiatan mampu menjangkau kelompok target yang telah direncanakan, baik dari sisi karakteristik, lokasi, maupun kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik dapat dikatakan efektif apabila manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima yang semestinya. Dalam konteks pengendalian abrasi pantai yang tepat sasaran berarti bahwa inisiatif pemerintah seperti pembangunan tanggul, penanaman mangrove, atau rehabilitasi pesisir benar-benar berfokus pada masyarakat dan wilayah yang paling terdampak oleh abrasi. Lokasi yang dipilih berdasarkan tingkat kerawanan abrasi dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat menunjukkan ketepatan ini. Untuk menilai seberapa efektif dan tepat sasaran kebijakan, program yang dirancang sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan warga akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa tepat sasaran di Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil, program pengendalian abrasi pantai telah menunjukkan kemajuan dengan

pembangunan tanggul dan penanaman mangrove. Namun, karena masih ada area yang belum tertangani dan infrastruktur yang rusak, program belum mencapai sasarannya sepenuhnya. Sebagian masyarakat merasa terbantu, tetapi mereka mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan implementasi yang lambat. Hal ini menunjukkan bahwa program belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat merupakan hambatan. Banyak warga belum memahami peran mereka dalam menjaga keberlanjutan program. Secara keseluruhan, program ini sudah berjalan, tetapi perlu ada peningkatan untuk mencapai tujuan yang lebih tepat, terutama dalam hal sosialisasi, keterlibatan masyarakat, dan pemerataan wilayah.

Namun, tepat sasaran pelaksanaan program ini masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang baik, masyarakat belum memahami sepenuhnya pentingnya program ini, menurut hasil wawancara. Ini mengakibatkan warga tidak terlibat secara aktif dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Mereka juga tidak menyadari tanggung jawab bersama dalam mengendalikan abrasi. Sebaliknya, kurangnya dana menjadi penghalang utama untuk kemajuan, yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan infrastruktur yang tidak diperbaiki. Kurangnya tenaga teknis dan koordinasi lintas sektor yang buruk memperburuk keadaan. Oleh karena itu, untuk membuat program lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, diperlukan peningkatan pendekatan sosialisasi berbasis partisipasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan optimalisasi dan penambahan anggaran.

Dengan demikian, diharapkan bahwa program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil, akan lebih tepat sasaran jika sosialisasi berbasis partisipasi ditingkatkan, intervensi didistribusikan secara merata di seluruh wilayah yang terdampak, dan dukungan anggaran yang lebih besar. Indikator tepat sasaran, seperti yang dijelaskan Sutrisno dalam Anis dkk (2021), menilai seberapa jauh program menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, strategi perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa program akan bertahan lama dan berhasil.

4.2.3. Adanya Program Untuk Pencapaian Tujuan Dalam Pengendalian Abrasi

Menurut Sutrisno dalam Anis dkk (2021) pencapaian tujuan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa berhasil suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar pencapaian tujuan program dapat dinilai secara akurat dan objektif, indikator ini harus spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu. Dalam penelitian pengendalian abrasi pantai, indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan program seperti penurunan abrasi, pembangunan tanggul, atau peningkatan partisipasi masyarakat. Program dinilai efektif jika hasil sesuai tujuan jika tidak, perencanaan dan pelaksanaan program harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa kendala masih menghalangi pencapaian

tujuan ini termasuk anggaran yang terbatas, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan partisipasi masyarakat yang tidak merata. Meskipun belum dapat mencakup seluruh wilayah pesisir secara keseluruhan, pengembangan dan perbaikan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan akademisi dan pihak ketiga untuk memberikan dukungan teknis. Oleh karena itu, program ini dinilai telah mencapai sebagian besar tujuan awalnya, terutama dalam mengurangi dampak abrasi dan melindungi pemukiman. Namun, untuk menjadi lebih berkelanjutan dan tepat sasaran di masa mendatang, masih diperlukan evaluasi dan dukungan terus menerus.

Hal ini diperkuat dengan teori Handayaningrat (2022) yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan bukan hanya diukur dari hasil kuantitatif, melainkan juga kualitas dampak terhadap masyarakat dan lingkungan strategis organisasi publik. Dalam konteks pengendalian abrasi pantai bahwa keberhasilan program pengendalian abrasi tidak terbatas pada jumlah tanggul yang dibangun atau luas wilayah yang direhabilitasi; itu juga harus mempertimbangkan sejauh mana program tersebut benar-benar melindungi masyarakat pesisir, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana, dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Misalnya, jika program pengendalian abrasi di suatu wilayah berhasil mengurangi tingkat kerusakan permukiman dan kehilangan lahan. Oleh karena itu, daripada melihat hanya prestasi fisik, evaluasi program harus melihat faktor-faktor kualitatif seperti kepuasan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan pesisir.

Dengan demikian tingkat pencapaian tujuan program pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya di wilayah Pantai Danau Belibis, sangat bergantung pada sejauh mana program tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika masyarakat melihat bahwa program telah berhasil mengurangi tingkat abrasi, membangun tanggul dengan efektif, dan meningkatkan perlindungan pemukiman, maka indikator pencapaian tujuan akan menunjukkan hasil yang baik. Namun, jika masyarakat tetap merasakan ancaman abrasi karena cakupan program yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan keterlibatan yang rendah, maka pencapaian tujuan dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana tujuan pengendalian abrasi pantai di wilayah Danau Belibis tercapai, sangat penting bahwa semua elemen yang menjadi target program dipenuhi, termasuk elemen teknis, sosial, dan kelembagaan.

4.2.4. Adanya Program Untuk Kegiatan terukur Dalam Pengendalian Abrasi

Menurut Sutrisno dalam Anis dkk (2021) menyatakan bahwa perubahan terukur adalah alat untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan menghasilkan dampak yang dapat diamati dan dibuktikan secara nyata melalui data dan fakta di lapangan. ini menekankan pentingnya perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai bukti pencapaian atau kemajuan menuju tujuan program. perubahan terukur didefinisikan sebagai perubahan yang dapat diidentifikasi secara sistematis melalui indikator yang spesifik, objektif, dan dapat dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah

implementasi suatu program atau kebijakan. Tidak hanya persepsi atau harapan, perubahan ini memiliki bukti yang dapat diukur dan divalidasi.

Berdasarkan teori tersebut, Program pengendalian abrasi pantai Kabupaten Aceh Singkil menggunakan pembangunan fisik seperti tanggul dan penanaman mangrove untuk mengukur perubahan dalam laju abrasi. Beberapa titik pantai yang sebelumnya kritis mulai stabil, menurut data dari dinas yang relevan. Masyarakat secara kualitatif mulai berpartisipasi dalam menjaga lingkungan pesisir. Penanaman mangrove dan kegiatan kebersihan pantai menunjukkan peningkatan kesadaran mereka. Bahwa program ini memiliki dampak yang dapat diukur dapat dilihat dari indikator seperti perubahan garis pantai, jumlah vegetasi pantai yang berhasil ditanam, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar perkiraan fakta di lapangan dapat memvalidasi perubahan tersebut.

Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan terukur adalah masih ada beberapa hambatan strategis dan operasional yang menghalangi program ini untuk dilaksanakan. Mengingat pengendalian abrasi membutuhkan biaya besar, yang bersaing dengan proyek pembangunan lain di tingkat daerah dan pusat, keterbatasan anggaran merupakan kendala utama. Selain itu, partisipasi masyarakat tidak ideal. Terlepas dari fakta bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya mempertahankan wilayah pesisir, masih sedikit yang aktif terlibat dalam menjaga dan merawat infrastruktur. Faktor perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga menjadi masalah besar karena menimbulkan keraguan tentang seberapa efektif program yang telah dilaksanakan dalam jangka panjang.

Hal ini diperkuat dengan teori Yusuf dkk (2023) yang menyatakan bahwa menekankan bahwa perubahan terukur harus memiliki tolok ukur yang jelas dan dapat dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk menunjukkan keberhasilan kebijakan atau program administrasi. Dalam konteks pengendalian abrasi pantai pemerintah, seperti penanaman mangrove, pembangunan tanggul, atau pemulihan wilayah pesisir, harus direncanakan dengan metrik khusus seperti penurunan laju abrasi, peningkatan luas vegetasi pantai yang tertutup, atau penurunan jumlah rumah warga yang terancam. Keberhasilan program akan sulit dibuktikan secara objektif tanpa tolok ukur yang terukur dan evaluasi berkala. Oleh karena itu, prinsip perubahan terukur sangat penting untuk menilai sejauh mana program pengendalian abrasi benar-benar memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan menjaga wilayah pesisir.

Di samping itu, masyarakat setempat mengalami kerugian dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan karena abrasi. Tanah yang terus terkikis mengancam pemukiman dan lahan pertanian, infrastruktur desa rusak, dan produktivitas sektor ekonomi seperti pariwisata dan perikanan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa abrasi memiliki efek berbagai macam, merusak properti seseorang dan mengganggu stabilitas sosial-ekonomi penduduk pesisir.

Dalam konteks program Pengendalian Abrasi, apabila masyarakat merasa program ini sudah memenuhi peningkatan rasa aman dan kepuasan masyarakat menunjukkan perubahan dalam persepsi dan kualitas hidup. Hasil survei dan forum menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan bantuan dan berharap program terus berlanjut. Efektivitas anggaran, yang berarti biaya yang

dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang dirasakan, juga merupakan indikator penting. Meskipun demikian, perubahan belum mencapai tingkat yang optimal. Hambatan seperti dampak iklim ekstrem, partisipasi masyarakat yang rendah, dan anggaran yang terbatas menunjukkan bahwa program perlu diperkuat dan diperluas. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa program telah menghasilkan perubahan yang dapat diukur sesuai dengan gagasan Sutrisno, meskipun cakupan dan keberlanjutan masih perlu diperbaiki.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas fungsi perencanaan *(planning)* dalam upaya Pengendalian Abrasi Pantai Di Kabupaten Aceh Singkil:

a) Adanya pemahaman program pengendalian abrasi

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis masih kurang memadai. Meskipun upaya teknis seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul telah dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung beranggapan bahwa pengendalian abrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanpa melibatkan peran aktif mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pengendalian abrasi di Pantai Danau Belibis belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang, terutama dalam hal keterlibatan dan pemahaman masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian abrasi.

b) Adanya Efektivitas program yang tepat sasaran dalam pengendalian abrasi

Dapat disimpulkan bahwa program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil, telah menunjukkan kemajuan dengan pembangunan tanggul dan penanaman mangrove. Namun, program ini belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran. Beberapa area masih belum tertangani, dan infrastruktur yang

ada mengalami kerusakan. Masyarakat merasa terbantu, tetapi mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan partisipasi yang rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka serta terbatasnya anggaran dan tenaga teknis menjadi kendala utama. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan sosialisasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas dan anggaran.

c) Adanya Program untuk pencapaian tujuan dalam pengendalian abrasi

Dapat disimpulkan bahwa Program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil, telah mencapai sebagian besar tujuan awalnya, seperti mengurangi dampak abrasi dan melindungi pemukiman. Namun, program ini belum sepenuhnya efektif karena beberapa kendala, termasuk anggaran yang terbatas, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun beberapa perbaikan dilakukan, seperti kerja sama dengan akademisi dan pihak ketiga, cakupan program masih terbatas pada beberapa wilayah pesisir. Oleh karena itu, pencapaian tujuan program belum optimal. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program di masa depan, diperlukan evaluasi berkala, peningkatan koordinasi, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta penambahan anggaran dan dukungan teknis.

d) Adanya Program untuk kegiatan terukur dalam pengendalian abrasi

Dapat disimpulkan bahwa Program pengendalian abrasi pantai di Pantai Danau Belibis, Aceh Singkil, telah memberikan hasil positif dalam mengurangi dampak abrasi dan melindungi pemukiman melalui pembangunan struktur seperti tanggul, revegetasi pantai, dan batu gajah. Sebagian besar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Namun, beberapa kendala masih menghambat pencapaian tujuan

program, seperti anggaran yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemeliharaan fasilitas, dan dampak perubahan iklim yang mempercepat proses abrasi. Selain itu, program ini belum menjangkau seluruh wilayah pesisir yang terdampak. Meskipun program ini telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat, pencapaian tujuannya masih belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan peningkatan cakupan wilayah, kesinambungan program, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, penambahan anggaran dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang program ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian tersebut. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan sosialisasi program pengendalian abrasi harus ditingkatkan untuk memberi masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan keuntungan program serta untuk mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pelaksanaannya.
b. Memberikan pelaksanaan program lebih sinergis, tepat sasaran, dan merata, koordinasi antar lembaga seperti Dinas PUPR, BNPB, dan pemerintah desa harus diperkuat.
c. Memberikan evaluasi program harus dilakukan secara berkala menggunakan metrik yang jelas dan dapat diukur untuk hasil fisik dan partisipasi masyarakat.

d. Perlu membuat program lebih efisien dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi anggaran dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aneta, Y., Abdussamad, J., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2018). *Analisis fungsi perencanaan pada pengembangan sistem transportasi publik di provinsi gorontalo*. *1*(2), 152–165.

Anis, I., Usman, J., Arfah, S. R., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2021). *EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA*. *2*.

Ariyani, N., Handayani, R., Studi, P., & Publik, A. (2024). *KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA*. *1*, 622–633.

Chairani, S. A. (2018). *Pemodelan spasial abrasi di pantai caringin desa caringin kecamatan labuan kabupaten pandeglang provinsi banten skripsi*.

Gart, I., Sdit, K., & Saman, M. (2023). *Implementasi Perencanaan (Planning) Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus SDIT Ma'had Muhammad Saman Sunggal)*. *5*, 1546–1553.

Hafizh, A., Rustamin, A., Putu, N., & Rossanty, E. (2023). *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga Desa Kaliburu*. *1*(2).

Handayaningrat, S. (2022). Administrasi publik dan dinamika pencapaian tujuan organisasi. Bandung: Fokus Media.

Heryana, A. (2018). Pengertian Informasi 1. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 14.

Innuddin, M., Rachman, D. F., Fathoni, A., & Hadi, S. (2023). *Metode Penelitian*.

1(3).

Irmanto, A., & Ridwan, M. (2021). *Analisis Tentang Pentingnya Rencana Strategis Organisasi (Analysis of the Importance of Organizational Strategic Plans)*. *1*(1), 1–7.

Iya, M., & Yaskinul, S. (2020). *Efektivitas Bangunan Pemecah Gelombang Dalam Pengendalian Abrasi Pantai di Kecamatan Biduk-Biduk Effectiveness of Building Breakwaters In Beach Abrasion Control at Biduk-Biduk District*. *1*, 107–119.

Izharsyah, J. R. (2022). *Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdkk Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan Internal Supervision Strategy For Subsidized Fertilizer Distribution In The Context of Transparency of thE-RDKK Program In Tangkahan Village Medan Labuhan*. *1*(1), 12–20.

JOORIE.M.RURU, D. K., ROMPAS, W. Y., & ABSTRAK. (2019). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA*. 14–24.

Jumliadi, Riska Puspitasari, Z. A. (2023). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk MeningkatkanPendapatan Asli DaerahTanjung Jabung Timur*. *1*, 7–11.

Khofifah Dwi Yuliyanti 1and Sriyanto 2. (2024). *Pemahaman dan Sikap Pelaku Usaha dalam Menghadapi Abrasi di Pantai Sigandu Understanding and Attitude of Business Actors in Facing Abration in Sigandul*.

Lenak, S. M. C. (2021). *Jurnal governance: Efektivitas Pelayanan Publik MelaluiPenerapan Electronic Government DiDinasPendidikanKotaTomohon*. *1*(1), 1–9.

Mahardika, H., Anjumi, H., Untung, S., & Info, S. (2024). *Perencanaan dalam pendidikan islam 1,2,3,4*. *9*(1), 11–21.

Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Munandar, A. (2020). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Tambahan lembaran negara ri*. *5587*, 1–107.

Noya, M., Noya, E. V., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Satya, K., & Pattimura, H. U. (2023). *Dampak Gelombang Kapal Cepat Pada Wilayah Pesisir Pantai Yang Mengakibatkan Abrasi*. *3*(1), 8–17.

Peraturan Menteri. (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat*.

Putra, A. A., Untung, A. R., Mamminanga, I., & Sengkang, U. P. (2023). *Efektivitas pelayanan publik pada kantor sekretariat daerah kabupaten wajo*. *3*(1).

Ramadhani, F., & Yusuf, A. (2023). Evaluasi Kebijakan dan Perubahan Administratif. Rajawali Pers.

Sustiyo Wandi, Tri Nurharsono, A. R. (2019). *Analisis Data dalam Pembinaan Prestasi*. *2*(8), 524–535.

sahir, Syafrida Hafni. Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository

UMA pada tanggal 27 Januari 2022.

Ummah, M. S. (2019). Perencanaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi pada smk kristen tagari 1. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14.

LAMPIRAN

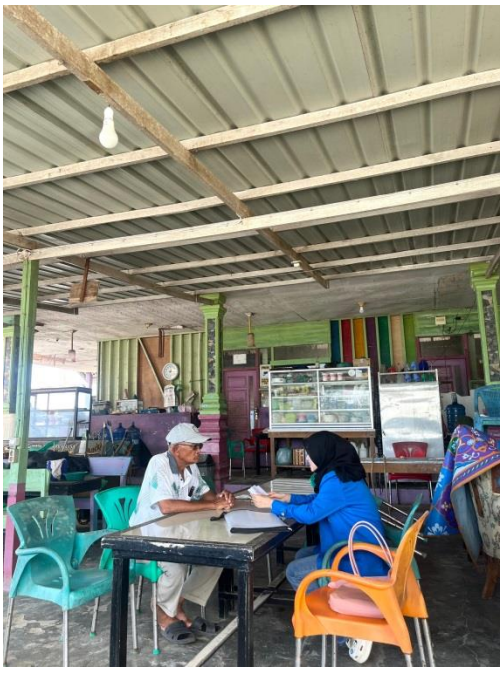
Foto Bersama Pak Hamzah Fansuri selaku Kabid Pengairan





Foto Bersama Pak H. Ismail Saleh Lubis selaku Masyarakat yang terkena dampak Abrasi





ACC Lapangan
Medan, 15-2-2015

DRAFT WAWANCARA

EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. **Narasumber**
   Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil
   A. Nama :
   B. Jabatan :
   C. Umur :

- **Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum**
  A. Nama :
  B. Jabatan :
  C. Umur :

- **Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum**
  A. Nama :
  B. Jabatan :
  C. Umur :

- **Masyarakat Desa Pulo Sarok Aceh Singkil**
  A. Nama :
  B. Jabatan :
  C. Umur :

2. **Daftar Pertanyaan**
   A. Pemahaman program
      - Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah mengetahui tentang program Pengendalian Abrasi Pantai yang ada di Kabupaten Aceh Singkil?
      - Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan program tersebut ?
      - Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan Pengendalian Abrasi di lapangan ?
      - Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala dalam mendukung Pemahaman Program Pengendalian Abrasi Pantai ini ?

- Menurut Bapak/Ibu, apa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman program pengendalian abrasi di pantai ini ?

B. Tepat sasaran

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil ?
- Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan perencanaan pengendalian abrasi pantai?
- Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala utama yang di hadapi dalam proses perencanaan pengendalian abrasi pantai ?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengendalian abrasi pantai ?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah program pengendalian abrasi pantai yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

C. Pencapaian tujuan

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program ini ?
- Menurut Bapak/Ibu, seberapa jauh program ini membantu dalam mengurangi risiko abrasi pantai di daerah ini ?
- Menurut Bapak/Ibu, apa saja langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pengendalian abrasi ini ?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah program pengendalian abrasi ini telah memenuhi tujuan yang diharapkan sejak awal ?

D. Perubahan terukur

- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum mengukur keberhasilan program ini ?
- Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mencapai perubahan yang diharapkan ?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara mengukur keberhasilan pengendalian abrasi pantai ?
- Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak abrasi pantai yang dirasakan oleh masyarakat stetempat ?

- Menurut Bapak/Ibu, apakah perubahan yang terjadi sudah sesuai dengan harapan masyarakat setempat ?

Draft wawancara ini dirancang berdasarkan empat kategorisasi utama, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, pencapaian tujuan dan perubahan terukur. Kategorisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas fungsi planning pada dinas pekerjaan umum dalam upaya pengendalian abrasi pantai di Kabupaten Aceh Singkil.

Medan, 8 Februari 2025

Aria Hesti Windani

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : **489**/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 20 Sya'ban 1446 H
19 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil**
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil, atas nama :

Nama mahasiswa	:	**ARIA HESTI WINDANI**
N P M	:	2103100027
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
Semester	:	VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	:	**EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402

Cc : File.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jln. As.Sayuthi No. – Dusun Kurnia Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil Aceh Singkil, Provinsi Aceh
Telepon 0658 - Fax. Email : Website :

Singkil, 14 April 2025

Nomor : 800.1.11 / 163 / 2025
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.489/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 19 Februari 2025, Perihal Permohonan Penelitian Mahasiswa.

2. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, bersama ini kami menyatakan bersedia menerima Mahasiswa untuk melakukan Penelitian / pengambilan data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi) dengan judul **"Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Upaya Pengendalian Abrasi Pantai di Kabupaten Aceh Singkil"**.

3. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil

ERWIN SYAHPUTRA,ST.MM
NIP.19730822 200604 1 002

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 01 November 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ARIA HESTI WINDANI
N P M : 2103100027
Program Studi : Ilmu administrasi Publik
SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif : 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas fungsi planning dalam pekerjaan umum dalam Pengendalian abrasi pantai dikabupaten Aceh singkil	Acc 1/11 2024
2	Optimalisasi Manajemen dalam Pembenahan lokasi berjualan di Pusat Pasar kota Medan	
3	Analisis Penyebab dan dampak banjir di aceh singkil : studi kasus di ujung bawang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 01 November 2024
Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S.Sos.,MSP)
NIDN:

Pemohon,

(ARIA Hesti Windani)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi :

(KHAIDIR ALI, S.Sos., MA)
NIDN: 0104088901

01/11 Pak KHAIDIR ALI MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 1993/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **01 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: **ARIA HESTI WINDANI**
N P M	: 2103100027
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: **EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**
Pembimbing	: **KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 011.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 01 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 06 Djumadil Awwal 1445 H
08 November 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik *FISIP UMSU di Medan;*
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 14 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aria Hesti Windani
NPM : 2103100027
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1993 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 01 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan umum Dalam Pengendalian Abrasi Di kabupaten Aceh singkil

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK – 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwarna **BIRU**;
9. Propsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua	Menyetujui	Pemohon,
Program Studi	Pembimbing	
(Ananda Mahardika S.Sos.M.Si)	(Khairul Ali S.Sos., MPA)	(Aria Hesti WINDANI)
NIDN: 0122118801	NIDN: 0104089401	

BAN-PT MQA Agensi Kelayakan Malaysia Malaysian Qualifications Agency QS STARS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 150/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DIMAS ANDHIKA SEBAYANG	2103100071	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI COORDINATING DINAS SDABMBK DALAM OPTIMALISASI PENATAAN KABEL UDARA DI WILAYAH KOTA MEDAN
2	SINDY ADELIA	2103100030	SYAFRUDDIN, S.Sos,, M.H.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM PROGRAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
3	RISDAYU HAPSAH	2103100061	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
4	TIARA PANJAITAN	2103100017	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROGRAM SI AMIN DUKCAPIL DI KOTA TANJUNG BALAI
5	ARIA HESTI WINDANI	2103100027	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Medan, 15 Rajab 1446 H
15 Januari 2025 M

Dekan,

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap : ARIA HECTI Windani
NPM : 2103100027
Program Studi : Ilmu administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	01/11/2024	Bimbingan Acc Judul	
2.	22/11/2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	9/12/2024	Bimbingan Bab II dan bab III	
4.	30/12/2024	Bimbingan Revisi Bab I, II, III	
5.	6/01/2025	Bimbingan Revisi Bab I, II, III	
6.	8/01/2025	Acc seminar proposal	
7.	6/02/2025	Bimbingan Draft Wawancara	
8.	15/02/2025	Acc Draft Wawancara	
9.	24/06/2025	Bimbingan Bab IV & Bab V	
10.	17/07/2025	Bimbingan Bab IV & Bab V	
11.	18/07/2025	Acc Sidang	

Medan, 29 Juli 2025

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, M.Si
NIDN: 0020017402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahardika S, S.Sos., M.Si
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

Khoiriah, S.Sos., M.A
NIDN: 0104069401

ISSN 2807-6729

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Aria Hesti Windani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper ***"Efektivitas Fungsi Planning Pada Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Pengendalian Abrasi Pantai di Kabupaten Aceh Singkil"*** has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 19, 2025

Editor In Chief

(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN
Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 http://perpustakaan.umsu.ac.id perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02137/KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	:	**Aria Hesti Windani**
NPM	:	**2103100027**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan/ P.Studi	:	**Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *28 Muharram 1447 H*
24 Juli 2025 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Aria Hesti Windani
Tempat/Tanggal Lahir	: Singkil, 10 Februari 2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: JL. Bahari
Anak ke	: 2 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah	: Sabri Party
Ibu	: Chalijah

Riwayat Pendidikan

- Tamat dari TK NEGERI PEMBINA SINGKIL, Tahun 2009, Berijazah
- Tamat dari SD NEGERI 4 SINGKIL , Tahun 2015, Berijazah
- Tamat dari MTSN SINGKIL, Tahun 2018, Berijazah
- Tamat dari SMA NEGERI 1 SINGKIL, Tahun 2021, berijazah
- Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Tahun 2021 – sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 20 Agustus 2025



Aria Hesti Windani